

# Bank Syariah Di Indonesia: *Corporate Governance* Dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Islami (*Islamic Social Responsibility Disclosure*)

Yasmin Umar Assegaf

Falikhhatun

Salamah Wahyuni

Fakultas Ekonomi dan Pusat Studi Ekonomi Islam UNS

## Abstract

*The objective of this research is to provide empirical evidence of the effect of corporate governance on Islamic Social Responsibility Disclosure in syariah banking Indonesia. This research examines the influence of corporate governance (broad size, cross-directorship, managerial ownership, and ownership diffusion) as independent variables, and Islamic Social Responsibility (ISR) Disclosure as the dependent variable. This research used 32 annual reports of listed companies on the website of syariah banking in Indonesia from 2007 – 2010. Sample was selected using purposive sampling method. Disclosure of Islamic Social responsibility is measured by content analysis method. While multiple regression analysis was used to test the four hypotheses developed in this research. The result found that broad size is a significant variable and positive effect on the volume of the disclosure of Islamic Social responsibility, and managerial ownership is negative significant on the variation of the disclosure of Islamic Social responsibility, while cross-directorship and ownership diffusion do not affect the Islamic Social responsibility disclosure (volume or variation). The contribution of this research is provided additional knowledge for regulator, investments analysts and capital market participant as the mechanism of islamic corporate governance on Syariah Banking in Indonesia.*

**Keywords:** *broad size, cross-directorship, managerial ownership, ownership diffusion, Islamic social responsibility disclosure, Syariah Banking*

## PENDAHULUAN

Dalam perspektif Islam, transparansi merupakan salah satu amanah yang menuntut organisasi untuk melakukan pengungkapan, baik yang bersifat wajib (*mandatory*) maupun sukarela (*voluntary*). Pengungkapan yang bersifat sukarela bergantung kepada keputusan manajemen untuk memasukkan atau tidak memasukkan informasi tambahannya ke dalam laporan keuangan (Zhou dan Panbuyuen, 2008). Salah satu bagian dari pengungkapan

sukarela adalah pengungkapan pertanggungjawaban sosial Islami bagi perbankan Syariah (Baydoun and Willet, 2000; Haniffa, 2002).

Keputusan manajemen ini sangat terkait dengan *agency theory* yang merupakan landasan teori dari implementasi *Corporate Governance*. *Corporate governance* pada dasarnya menyangkut masalah pengendalian perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan pemilik

perusahaan (pemegang saham). Masalah ini muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelola perusahaan. Pemilik sebagai pemasok modal perusahaan mendelegasikan kewenangan atas pengelolaan perusahaan kepada *profesional managers*. Akibatnya kewenangan untuk menggunakan *resources* perusahaan sepenuhnya ada di tangan para eksekutif. Pemegang saham mengharapkan manajemen bertindak secara profesional dalam mengelola perusahaan. Setiap keputusan yang diambil seharusnya didasarkan pada kepentingan pemegang saham dan *resources* yang ada digunakan semata-mata untuk kepentingan pertumbuhan (nilai) perusahaan. Meskipun demikian, yang sering terjadi adalah bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen tidak semata-mata untuk kepentingan perusahaan tetapi juga untuk kepentingan para eksekutif, sehingga muncul konflik kepentingan termasuk dalam pengungkapan informasi yang terkait dengan CSR.

Praktik pengungkapan CSR telah banyak diterapkan oleh perusahaan publik di Indonesia. Walaupun secara umum praktek CSR lebih banyak dilakukan oleh perusahaan tambang maupun manufaktur, namun, seiring dengan adanya tren global akan praktik CSR, saat ini industri perbankan juga telah menyebutkan aspek pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunannya walaupun dalam bentuk yang relatif sederhana. Pengungkapan tersebut tidak hanya dilakukan oleh perbankan konvensional tetapi juga dilakukan oleh perbankan syariah (Fitria dan Hartanti, 2010).

Di Indonesia perbankan syariah tercatat

tumbuh dengan signifikan dengan pertumbuhan sebesar 48,8% lebih tinggi dibandingkan bank konvensional yang hanya tumbuh 20% untuk tahun 2011, namun dibandingkan perbankan konvensional pangsa pasar perbankan syariah masih relatif kecil ukurannya yaitu sebesar 3,47% (*Outlook Perbankan Syariah 2012*). Akan tetapi prospek industri syariah ini di masa datang diyakini akan semakin bagus dan patut diperhitungkan..

Mengenai praktek CSR di lembaga perbankan syariah, menurut Ahmad (2002, dalam Fitria dan Hartanti, 2010), lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur'an dan Sunah, sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. CSR dalam perbankan syariah harus diyakini dan dipahami sebagai bagian integral dalam memenuhi konsistensi terhadap prinsip-prinsip syariah operasional perbankan syariah, sehingga program-program CSR tidak sekedar tebar pesona atau hanya karena kewajiban yang diamanahkan undang-undang saja. Program CRS Islami harus benar-benar menyentuh kebutuhan asasi masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi ke arah yang lebih baik (Yusuf, 2010). Dasar filosofi tersebut bersifat religius, sehingga harus diyakini bahwa hubungan yang terjalin dengan masyarakat (*stakeholder*) akan lebih bersifat berkelanjutan dibandingkan pola CSR konvensional.

Beberapa studi yang terkait dengan implementasi CSR pada bank Islam antara lain, Farook dan Lanis (2005) menyelidiki tentang pelaksanaan CSR bank syariah

dalam Laporan tahunan dan menilai faktor-faktor penting dalam pelaksanaan CSR yang mungkin ada. Selanjutnya Dusuki dan Dar (2005) menilai persepsi *stakeholders* bank syariah terhadap CSR di Malaysia. Sairally (2005) melakukan identifikasi tanggungjawab social bank Islam masuk dalam tujuan, praktik dan komitmen bank sehingga member sumbangan bagi kesejahteraan manusia. Maali, et.al. (2006) membuat standar bagi transparasi laporan CSR bagi bank syariah dalam Islam Islam yang meliputi tanggungjawab, keadilan dan kepemilikan. Selanjutnya Farook (2007) menguji prinsip-prinsip CSR untuk dijadikan kerangka dalam pelaksanaan CSR pada institusi keuangan Islam.

Selanjutnya Otman, et.al (2009) menguji karakteristik perbankan syariah terhadap pengungkapan pertanggungjawaban social Islami (ISR). Hasil riset tersebut menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan pertanggungjawaban social islami perbankan Islam di Malaysia.

Fitria dan Hartanti (2010) melakukan perbandingan pengungkapan pertanggungjawaban social Islami dengan menggunakan *Global Reporting Initiative Indeks* dan *Islamic Social Reporting Indeks*. Hasil penelitian menunjukkan pengungkapan pertanggungjawaban social Islami dengan *Global Reporting Initiative Indeks* memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan *Islamic Social Reporting Indeks* pada perbankan syariah di Indonesia. Terakhir kajian yang dilakukan Yusuf and Bahari (2011) meneliti tentang pertanggungjawaban social Islami menuju

pengurangan kemiskinan pada perbankan syariah di Indonesia. Hasilnya perbankan syariah di Indonesia menganggap pertanggungjawaban social Islami masih merupakan *fardhu kifayah*, sehingga belum dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah implementasi *Corporate Governance* (*broad size, cross-directorship, managerial ownership* dan *ownership diffusion*) berpengaruh terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial Islami (*Islamic Social responsibility disclosure*) baik dilihat dari variasi maupun volume pengungkapan pada perbankan syariah di Indonesia?

#### **KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Islam sebagai cara hidup memberikan panduan bagi umatnya untuk beradaptasi dan berkembang sesuai dengan jamannya. Islam memungkinkan umatnya untuk berinovasi dalam muamalah, namun tidak dalam akidah, ibadah dan akhlaq (Kamali, 1989) dalam Fitria dan Hartanti (2010).

Lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur'an dan Sunah, sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Oleh karenanya ikatan hubungan antara institusi dengan lingkungannya dalam konsep syariah akan lebih kuat ketimbang dalam konsep konvensional, karena pada syariah didasarkan pada dasar-dasar relijius.

Dalam Islam, manusia bertanggungjawab terhadap Allah dalam melaksanakan aktivitasnya dan segala aktivitas yang dilakukannya dalam rangka mencapai

Ridho-Nya. Dengan demikian, hubungan dan tanggungjawab antara manusia dengan Allah ini akan melahirkan kontrak religius (*hablum minallah*) yang lebih kuat dan bukan sekedar kontrak sosial belaka (*hablum minanaas*).

Beberapa ayat Al Qur'an dan Al Hadits yang dapat dipersepsikan dengan konsep kejujuran termaktub antara lain surat Al Baqarah (2) : 282 dan Al Anfal (8) : 59, serta hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang artinya: "Wajib atas kalian untuk jujur, sebab jujur itu akan membawa kebaikan, kebaikan akan menunjukkan jalan ke Jannah, begitu pula seseorang yang senantiasa jujur dan memerhatikan kejujuran, sehingga akan termaktub di sisi Allah atas kejujurannya. Sebaliknya janganlah berdusta, sebab dusta akan mengarah pada kejahatan, dan kejahatan akan membawa ke Neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memerhatikan kedustaannya, sehingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta".

Kejujuran merupakan hal yang sangat krusial dalam implementasi *Corporate Governance*, terutama pada perbankan syariah. Hal ini berarti setiap informasi yang disajikan di dalam Laporan Tahunan (Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan) harus mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi pada perbankan syariah. Oleh karena itu implementasi *Corporate Governance* akan mempengaruhi transparansi dalam pembuatan Laporan tahunan.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan empat proksi *Corporate Governance* yang terdiri dari *board size*, *cross-directorship*,

*managerial ownership* dan *ownership diffusion*

### **Board size**

*Board size* memegang peranan penting untuk mengurangi *earning management* (Zhou, 2004). Jumlah anggota dewan komisaris yang lebih banyak dengan berbagai macam latar belakang pendidikan dan keahlian menghasilkan kemampuan yang lebih baik dalam mendistribusikan beban kerja, meningkatkan kualitas pembuatan keputusan, meningkatkan kualitas kepentingan *stakeholder*, dan menghilangkan dominasi CEO (Zhou, 2004).

Jensen (1993) berpendapat bahwa ketika dewan komisaris terdiri dari tujuh atau delapan orang, maka mereka akan berfungsi kurang efektif dan lebih mudah dikendalikan oleh CEO. Fakta empiris menemukan bahwa ketika dewan komisaris dengan jumlah anggota sedikit, maka kualitas pengawasan akan lebih baik (Yermack, 1996), karena masalah keagenan akan meningkat sesuai dengan *board size* (Conger, et.al. (1998). Selanjutnya Yermack (1996) juga menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara *market value* dan jumlah anggota dewan komisaris.. Adapun Conger, et.al. (1998) menyatakan untuk menjadi *empowered board* dewan komisaris harus cukup kecil sehingga dapat menciptakan kelompok yang lebih kohesif. Oleh karena itu, hipotesis yang akan diuji adalah:

H1: Terdapat pengaruh negatif signifikan antara *board size* terhadap pengungkapan per-tanggungjawaban sosial Islami (baik pada variasi maupun volume pengungkapan)



### ***Cross-directorship***

*Cross-directorship* berarti dewan komisaris yang memangku kedudukan pada dua atau lebih perusahaan. Menurut Dahya et al. (1996) dalam Haniffa dan Cooke (2000), *cross-directorship* akan membuat informasi menjadi lebih transparan karena digunakan sebagai perbandingan dari pengetahuan organisasi lain.

Ketika kedudukan dewan komisaris hanya pada satu perusahaan (*unitary board*), maka tidak akan terjadi distribusi informasi yang diperlukan. Selanjutnya dewan komisaris tidak akan memperoleh informasi untuk mengevaluasi manajemen dan informasi dari organisasi lain yang dapat memberikan nilai tambah.

Hashim dan Devi (2007) menemukan hubungan positif signifikan antara proporsi dewan yang memiliki *cross-directorship* (*governance expertise*) dengan *earnings quality*. Gul dan Leung (2000) juga menemukan bahwa *independent director* yang berkualitas, dalam hal ini memiliki *cross-directorship*, mampu mengeliminasi pengaruh tidak signifikan antara *independent director* dengan pengungkapan *voluntary disclosure*. Penggunaan komisaris independen yang memiliki *cross-directorship* akan memberikan keyakinan yang lebih tinggi dalam pengungkapan *voluntary disclosure* (Tsui dan Gul, 2000). Hipotesis yang akan diuji adalah:

H2: Terdapat pengaruh positif signifikan antara *cross-directorship* dengan pengungkapan pertanggungjawaban sosial Islami (baik pada variasi maupun volume pengungkapan)

### ***Managerial Ownership***

Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa konflik dalam suatu perusahaan dapat terjadi karena adanya pemisahan antara pemegang saham dengan manajemen (*agency problem*). Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan memperkecil adanya konflik atau *agency problem* tersebut. Manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan.

Asosiasi negatif antara kepemilikan manajerial dan pengungkapan dapat terjadi karena dengan semakin besarnya kepemilikan manajerial (*Managerial Ownership*), monitoring yang dilakukan oleh pemegang saham telah dilakukan oleh manajemen sehingga manajemen tidak perlu banyak melakukan pengungkapan. Peminimalisasian peng-ungkapan tersebut merupakan bentuk pengurangan *agency cost* sebagai akibat adanya kepemilikan manajerial (Eng dan Mak, 2003). Mengacu pada hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

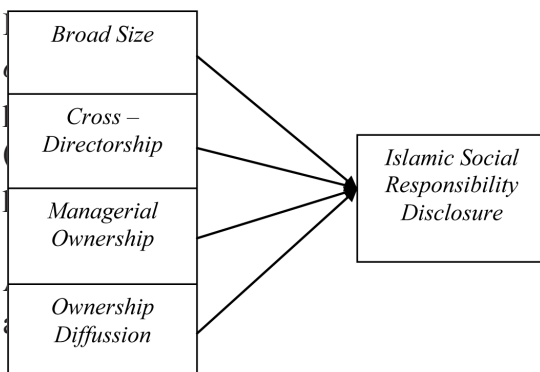
H3: Terdapat pengaruh negatif antara kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) dengan pengungkapan pertanggungjawaban sosial Islami (baik pada variasi maupun volume pengungkapan)

### ***Ownership diffusion***

*Agency cost* meningkat ketika *ownership structure* menjadi lebih tersebar. Hal ini disebabkan perusahaan seperti itu merupakan subjek konflik kepentingan dibandingkan dengan perusahaan yang

memiliki *ownership structure* terkonsentrasi (Oliveira et al., 2008). Li, et.al. (2008) juga menggunakan proksi konsentrasi kepemilikan saham (*share concentration*) sebagai proksi untuk struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan akan mempengaruhi tingkat monitoring dan pengungkapan sukarela (Eng and Mak, 2003).

Teori agensi berpendapat bahwa dengan difusi kepemilikan (*ownership diffusion*) yang lebih besar, perusahaan lebih mendapatkan tekanan dari pemegang saham untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar dengan tujuan mengurangi *agency cost* dan asimetri informasi. Dengan demikian, perusahaan dengan *ownership diffusion* yang tinggi memiliki lebih banyak dorongan untuk mengungkapkan informasi sukarela, mengurangi *agency cost*. Dengan demikian, hipotesis yang dapat dikembangkan di dalam penelitian ini adalah:



**Gambar 1**  
**Rerangka Konseptual**

## METODA PENELITIAN

### Populasi, Sampel, dan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang ada di

Indonesia. Adapun yang menjadi sampel adalah seluruh Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah dari Bank Devisa yang telah ada di Indonesia sejak tahun 2002 dan menerbitkan Laporan Keuangan antara tahun 2007 – 2010.

Selanjutnya data yang dibutuhkan adalah: (1) data tentang implementasi CG yaitu alat untuk menjamin direksi dan manajer (*insider*) agar bertindak yang terbaik untuk kepentingan investor luar (kreditur atau *shareholder*), (2) data tentang pengungkapan pertanggungjawaban social Islami yaitu pengungkapan yang terkait identifikasi tanggungjawab social bank Islam masuk dalam tujuan, praktik dan komitmen bank sehingga memberi sumbangan bagi kesejahteraan manusia.

Data-data tersebut diperoleh dari industri perbankan dan Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, instansi terkait yang relevan, dan laporan keuangan publikasian yang dikumpulkan dari internet dengan alamat: <http://www.banksyariah.co.id>.

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel penelitian meliputi variabel independen yaitu implementasi prinsip-prinsip CG dan variabel dependen yaitu pengungkapan pertanggungjawaban sosial islami pada bank syariah. Variabel *Corporate Governance* (X1) adalah alat untuk menjamin direksi dan manajer (*insider*) agar bertindak yang terbaik untuk kepentingan investor luar (kreditur atau *shareholder*). Proksi untuk mengukur variabel ini mengacu pada penelitian Cerbioni dan Parbonetti (2007) yang meliputi:

*Board size* atau jumlah komisaris pada perusahaan, merupakan banyaknya anggota yang duduk pada dewan komisaris. Penggunaan *board size* mengacu pada penelitian Yermack (1996), dan Conger, et.al. (1998) telah menggunakan karakteristik dewan komisaris sebagai *variable independen* sebagai atribut dari *good corporate governance*.

*Cross-directorship* merupakan salah satu karakteristik dewan komisaris (*governance expertise*). Terjadi ketika dewan komisaris memangku kedudukan tersebut pada dua atau lebih perusahaan. Penelitian ini yang mengacu pada Hashim dan Devi (2007) yaitu banyaknya anggota dewan komisaris yang *cross-directorship* dibagi dengan jumlah (*size*) anggota dewan komisaris.

*Managerial ownership* diukur dengan menghitung jumlah kepemilikan saham oleh manajer. Jumlah ini kemudian dibagi dengan total saham yang beredar, sehingga hasil dari perhitungan proksi ini adalah berupa presentase kepemilikan saham oleh manajer dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Pengukuran variabel mengacu pada penelitian Eng dan Mak (2003), dan Firer et. al (2007). *Ownership diffusion* diukur dengan menghitung persentase saham yang dimiliki oleh tiga pemegang saham utama dan yang diketahui.

Selanjutnya pengungkapan pertanggungjawaban sosial Islami menggunakan *Islamic Social Responsibility Indeks* mengacu pada sebagian indikator penelitian Haniffa (2002) dan Fitria dan Hartanti (2010) yang terdiri produk dan jasa, tenaga kerja, masyarakat dan lingkungan. Pengukuran variabel dependen

menggunakan dua metrik, yaitu : *disclosure index* (ISRDI) untuk menghitung variasi pengungkapan yang terdiri dari dua format, yaitu: *text* dan *numbers*, dan *word count* (ISRWC) untuk menghitung volume pengungkapan. Indeks ini dimodifikasi dari penelitian Li, et al., 2008.

Berikut adalah persamaan *Islamic Social Responsibility disclosure index* (ISRDI) untuk menghitung variasi pengungkapan:

$$ISRDI_j = \frac{\sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}}{n_j}$$

$n_j$  = jumlah item yang diungkap oleh perusahaan *jth*

$X_{ij}$  = 1 jika perusahaan mengungkapkan item *ith*,  
0 jika perusahaan tidak mengungkapkan, sehingga  $0 \leq ISRDI_j \leq 1$ .

Pengukuran volume pengungkapan *Islamic Social Responsibility* (ISRWC) dilakukan dengan menghitung jumlah kata di dalam *annual report* yang berhubungan komponen-komponen pengungkapan *Islamic Social Responsibility*. Jumlah kata dipilih sebagai metode penghitungan volume pengungkapan karena menurut anggapan peneliti, kata merupakan unit terkecil dalam pengukuran untuk analisis kualitatif dengan *content analysis* dan diharapkan dapat memaksimalkan ketelitian dalam menghitung volume pengungkapan tersebut secara kuantitatif (Zeghal dan Ahmed, 1990).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis *multiple regression*.

Adapun persamaan regresinya adalah:

$$ISRDI = \beta_0 + \beta_1 BSIZE + \beta_2 CROSS-DIR + \beta_3 MO + \beta_4 OD + \epsilon_i$$

Notasi:

ISRDI = *Islamic Social Responsibility Disclosure.*

BFSIZE = *Broad Size,*

CROSS-DIR = *Cross-Directorship.*

MO = *Managerial Ownership,*

OD = *Ownership Diffussion,*

$\beta_0$  = *intercept,*

$\beta_1, \dots, \beta_4$  = koefisien regresi, dan

$\epsilon$  = *error.*

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan pada 5 BUS dan 8 UUS untuk periode 2007 – 2010 dengan total sampel yang bisa diolah sebanyak 32 laporan keuangan. Berikut statistik deskriptif untuk masing-masing pengungkapan:

Tabel 1

Jumlah Pengungkapan *Islamic Sosial*

No	ISRDI	Jumlah (ISRDI)	% (ISRDI)	Jumlah (ISRWC)	% (ISRWC)
1	<i>Produk &amp; jasa</i>	487	31.8 %	43658	25.0 %
2	<i>Tenaga Kerja</i>	570	37.1%	87822	50.3 %
3	<i>Masy &amp; Lingk</i>	476	31.1%	43049	24.7 %
<b>Total</b>		1533	100 %	174529	100

Sumber: Hasil Olahan Data

Pada table 1 di atas terlihat bahwa pengungkapan terbesar adalah pada aspek tenaga kerja baik pada indeks pengungkapan (37,1%) maupun *word count* (50,3%), kemudian diikuti oleh aspek produk dan jasa, dan terakhir aspek tentang masyarakat dan lingkungan.

Selanjutnya adjusted R<sup>2</sup> tabel 2 di bawah ini menunjukkan nilai sebesar 0.218,

untuk ISRDI dan 0,259 untuk ISRWC. Nilai F hitung sebesar 2.327 dengan probabilitas 0,076 untuk ISRDI dan 3,331 dengan probabilitas 0,012. Probabilitas untuk ISRDI bernilai dibawah  $\alpha$  0.10, dan probabilitas ISRWC bernilai dibawah  $\alpha$  0.05m dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi *Islamic Social Responsibility Disclosure* (ISRDI) atau dapat dikatakan bahwa *Broad size*, secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Islamic Social Responsibility Disclosure* (ISRDI).

Tabel 2.

Ringkasan Hasil analisis Regresi Berganda

Variabel	Arah Prediksi	ISRDI		ISRWC	
		t	Sig.	t	Sig.
(Constant)		1.870	.078	5.860	.000
<i>Broad Size</i>	-	-1.758	.167	-2.242	.029**
<i>Cross-Directorship</i>	+	.160	.846	-.838	.384
<i>Managerial Ownership</i>	-	-1.467	.077	-1.026	.286
<i>Ownership Diffussion</i>	+	-1.176	.263	-1.989	.136
R Square			.430		.524
Adjusted R Square			.218		.259
Std. Error Estimate			.06772		.50162
F			2.327		3.331
Sig.			.076*		.012**

Sumber: Hasil Olahan Data

Sesuai dengan hasil regresi pada tabel 2, koefisien regresi *broad size* (BFSIZE) terhadap ISRDI dan ISRWC bernilai negatif dengan tingkat signikansi yang berbeda. Untuk *broad size* tidak mempunyai pengaruh terhadap ISRDI dengan tingkat signifikansi 0.1671 jauh di atas nilai  $\alpha < 0.05$ . Sebaliknya terdapat pengaruh *broad size* terhadap ISRWC dengan tingkat signifikansi 0.029.

Hasil analisis tersebut mendukung hipotesis pertama yang berarti volume pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* dipengaruhi oleh *broad*



*size* suatu perusahaan. Artinya, semakin banyak anggota *broad size*, semakin rendah pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* perusahaan. Hasil pada panel pertama sama dengan penelitian yang dilakukan Lakhali (2003), serta Nasir dan Abdullah (2004) yang tidak menemukan hubungan antara *board size* dengan tingkat pengawasan maupun *voluntary disclosure*. Namun, pada panel dua sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yermack (1996) yang menemukan hubungan negatif antara *market value* dan *board size*. Menurut Yermack (1996), ketika *board size* memiliki jumlah anggota sedikit, maka akan meningkatkan kualitas pengawasan. Selanjutnya *Cross-directorship* tidak berpengaruh baik terhadap variasi maupun volume pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ho dan Wong (2001) serta Haniffa dan Cooke (2002). Menurut Ho dan Wong (2001), hal tersebut dikarenakan CEO atau *managing director* merupakan pemegang saham yang substansial, sehingga tidak menjadi suatu permasalahan ketika jabatan CEO dan *chairman* dijabat oleh satu orang. Menurut hemat penulis, keterbatasan pejabat inilah yang dimungkinkan menyebabkan variasi dan volume pengungkapan aktifitas sosial menjadi kurang lengkap.

Nilai *t* *Managerial Ownership* terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* pada panel ISRDI memiliki angka sebesar -1,467, dengan tingkat signifikansi sebesar .077, sedangkan nilai *t* ISRWC terhadap *Managerial Ownership* (MO) sebesar -1.026 dengan tingkat signifikansi sebesar .286. Untuk proksi MO

mempunyai pengaruh signifikan terhadap ISRDI, tetapi dengan nilai yang negatif yang berarti semakin besar komposisi *non-executive directors*, maka semakin kecil variasi pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Gul dan Leung (2000) menemukan bahwa *CEO dominance* memiliki pengaruh signifikan terhadap rendahnya *voluntary disclosure* yang dilakukan perusahaan.

Selanjutnya koefisien regresi *Ownership Diffusion* terhadap ISRDI, bernilai positif negatif sebesar -1,176 dengan tingkat signifikansi 0,263, dan koefisien regresi terhadap ISRWC bernilai negatif sebesar -0,1989 dengan tingkat signifikansi 0,136. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *IO* tidak signifikan, karena  $\alpha > 0.05$ . Hasil penelitian berbeda dengan Xu and Wang (1997), yang menyatakan bahwa *ownership diffusion* hanya berpengaruh terhadap *mandatory disclosure* yaitu kinerja keuangan perusahaan, tetapi tidak berkaitan dengan *voluntary disclosure* seperti aktivitas sosial perusahaan.

#### **PENUTUP / SIMPULAN**

Hasil analisis data dalam penelitian ini mengidentifikasi beberapa hal: hasil pengujian hipotesis pertama mengenai pengaruh *broadsize* terhadap ISRDI tidak signifikan, sedangkan pengaruh *broadsize* terhadap ISRWC signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada bank syariah di Indonesia *boardsize* tidak berpengaruh pada variasi pengungkapan, tetapi berpengaruh terhadap volume pengungkapan informasi *Islamic Social Responsibility*.

Selanjutnya hasil pengujian hipotesis

kedua menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh *Cross-directorship* terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* baik variasi maupun volume pengungkapan, sedangkan hasil pengujian hipotesis ketiga menyimpulkan *Managerial Ownership* berpengaruh negatif signifikan terhadap variasi ISRDI, dan tidak berpengaruh terhadap volume ISRWC. Hasil pengujian hipotesis keempat menyimpulkan tidak terdapat pengaruh *ownership diffusion* terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* baik variasi maupun volume pengungkapan.

#### **Keterbatasan dan Saran**

Pengungkapan *Islamic Social Responsibility* (ISR) lebih banyak pada aspek tenaga kerja, diikuti dengan produk dan jasa, sedangkan pengungkapan mengenai aktivitas yang terkait dengan masyarakat dan lingkungan masih kurang. Oleh karena kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosial islami untuk tahun-tahun mendatang lebih banyak ber-orientasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan, sehingga kemanfaatan bank syariah lebih banyak dirasakan masyarakat luas.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa semua proksi dalam *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap variasi pengungkapan, sehingga disarankan untuk perbankan syariah di Indonesia lebih banyak mengungkapkan aktifitas sosial Islami yang lebih bervariasi, tidak hanya penanaman sejuta pohon, tapi juga kegiatan pemeliharaannya.

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan antara lain penghitungan

variasi dan volume pengungkapan *Islamic Sosial Responsibility* (ISR) bersifat subyektif, sehingga perlu klarifikasi dari penyedia laporan keuangan. Selanjutnya beberapa laporan keuangan tidak lengkap dalam mengungkapkan aktifitas sosial yang telah dilakukan bank syariah di Indonesia, khususnya untuk Unit Usaha Syariah, sehingga agak kesulitan di dalam mengkategorikan kegiatan sosial tersebut apakah masuk kegiatan sosial induk perusahaan atau anak perusahaan.

Penelitian selanjutnya dapat lebih difokuskan pada pendekatan lain dalam mengukur pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*, misalnya dengan pendekatan masalah seperti yang juga direkomendasikan oleh Yusuf (2010).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Baydoun, N. and Willet, R., 2000, "Islamic corporate reports", *Abacus*, Vol. 36, No. 1, pp. 71-90.

Cerbioni, F. dan A. Parbonetti. 2007. Exploring the Effects of Corporate Governance on Intellectual Capital Disclosure: An Analysis of European Biotechnology Companies. *European Accounting Review*, 16 (4): 791-826.

Conger, J.A., D. Finegold, and E.E. Lawler III. 1998. Appraising boardroom performance. *Harvard Business Review* 76 (January-February): 136-148.

Dusuki, A.W., & Dar, H. 2005. Stakeholders' perceptions of Corporate Social Responsibility of Islamic Banks: Evidence From Malaysian Economy. *International Conference on Islamic Economics and Finance*.

- Eng, L. L. and Mak Y. T. 2003. Corporate Governance and Voluntary Disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy* (22), pp.325-345.
- Farouk,S and Lanis, R. 2005. Banking on Islam? Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure. *The 6 th International Conference on Islamic and Fnance*. Jakarta.
- Farouk, Sayd. 2007. On Corporate Social responsibility on Islamic Financial Institutional. *Islamic Econimic Studies*, Vol. 15, No. 1.
- Fitria dan Hartanti. 2010. Islam dan tnggungjawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social responsibility. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Purwokerto.
- Firer, S. and Williams, S. Mitchell. 2007. Association Between the Ownership Structure of Singapore Publicly Traded Firms and Intellectual Capital Disclosures. [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)
- Gul, F.A., dan Leung. 2000. CEO dominance and voluntary corporate disclosure strategies in Hong Kong annual reports. *Working Paper, City University of Hong Kong*.
- Haniffa, M. R. and Cooke, T. E. 2000. Culture, Corporate Governance, and Disclosure in Malaysian Corporations. *Abacus*, 38 (3): 317-349.
- Haniffa, R. 2002. "Social Reporting Disclosure-An Islamic Perspective", *Indonesian Management & Accounting Research* 1(2), pp.128-146
- Hashim, H.A., and Devi S.S. 2005. Board independence, expertise, and earning quality: Malaysian evidence. [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)
- Ho, Simon S. M. and Kar Shan Wong. 2001. A Study of The Relationship Between Corporate Governance Structures and The Extent of Voluntary Disclosure. *Journal of International Accounting, auditing & Taxation*, 10: 139-156.
- Jensen, M.C dan Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3: 305-360.
- Jensen, M.C. 1993. The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems. *Journal of Finance* 48: 831-880.
- Lakhal, F. 2003. Earning Voluntary Disclosures and Corporate Governance: Evidence from France. [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)
- Li. Jing, Richard Pike, and Roszaini Haniffa. 2008. Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Structure in UK Firms. *Accounting and Business Research*, 38 (2): 137-159.
- Maali, B., Casson, P., Napier, C. 2006. Social Reporting by Islamic Banks. *Abacus*, Vol. 42 (2), pp 266-289.
- Nasir, M.N., S.N. Abdullah. 2004. Voluntary Disclosure and Corporate Governance

- Among Financially Distressed Firms in Malaysia. [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)
- Oliveira, L., L.L. Rodrigues., L. Craig. 2004. Applying voluntary disclosure theories to intangibles reporting: Evidence from the Portuguese stock market. [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)
- Otman, Rohana., Azlam M. Thani, and Erlane K. Ghani. 2009. Determinants of Islamic Social Responsibility among Top Shariah approved n Bursa Malaysia. *Research of Journal International Studies*, Issues 12, October.
- Pike, S., A. Rylander., and G. Roos. 2001. Intellectual capital management and disclosure. *The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge: A Selection of Readings*, Oxford University Press.
- Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi bank Umum. *DitJend Peraturan Perundang-undangan*.
- Sairally, Sama. 2005. Evaluating the Social responsibility on Islamic Finance. Learning from the experience of Sossially Responsible Investment Funds. *The 6 th International Conference on Islamic and Fnance*. Jakarta.
- Samad, Abdus and Hassan M. Kabir. 1999. The Performance of Malaysian Islamic Banking 1984 – 1997, Explanatory Study. *International Journal of Islamic Finance Service*, Vol. 1, No. 3. Oktober- Desember.
- Tsui, J dan F.A. Gul. 2000. Corporate Governance and Financial Transparencies in the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China. [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com).
- Yermack, D. 1996. Higher market valuation of companies with a small board of directors. *Journal of Financial Economies* 40: 185-221.
- Yusuf, Mohamad Yasir. 2010. Aplikasi CSR dalam Bank Syariah: Suatu Pendekatan masalah dan Maqhasidh syariah. *EKBISI*, Vol. 4, No. 2, Juni 2010, hal. 98-115.
- Yusuf, Mohamad Yasir and Zakaria Bahari. 2011. Islamic Corporate Social Responsibility in Islamic Banking: Toward Proverty Alleviation. *The 8 th International Conference on Islamic and Fnance*.
- Zeghal, Daniel dan Ahmed, Sadrudin, A. 1990. *Comparison of Social Responsibility Information Disclosure Media Used by Caanadian Firms*. AAA Journal, pp 38-53
- Zhou, J dan K. Y. Chen. 2004. Audit Committee, Board Characteristics and Earnings Management by Commercial Banks. [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com).
- Zhou, MM dan Panbuyen, P. 2008. The Association Between Board Composition and Different Types Disclosure. *Unpublished Thesis*.
- [www.bankbnis.co.id](http://www.bankbnis.co.id)  
[www.bankbris.co.id](http://www.bankbris.co.id)  
[www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id)  
[www.muamalatindonesi.co.id](http://www.muamalatindonesi.co.id)  
[www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)  
[www.cimbniaga syariah.co.id](http://www.cimbniaga syariah.co.id)  
[www.bankbiis.co.id](http://www.bankbiis.co.id)



[www.bankbtnsyariah.co.id](http://www.bankbtnsyariah.co.id)

[www.bankbcasyariah.co.id](http://www.bankbcasyariah.co.id)

[www.bankpermatasyariah.co.id](http://www.bankpermatasyariah.co.id)

[www.bankbukopinsyariah.co.id](http://www.bankbukopinsyariah.co.id)

[www.bankdanamonsyariah.co.id](http://www.bankdanamonsyariah.co.id)